

PENGARUH KEBIJAKAN KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PAI DI SMP

Muhammad Robin Firmansyah¹, Moh Ibnu Rofi'², Zainal Arifin³, Mahbubi⁴

¹²³⁴Universitas Nurul Jadid; Probolinggo

pai.2510700055@unuja.ac.id¹, pai.2510700015@unuja.ac.id², pai.2510700024@unuja.ac.id³,
mahbubi@unuja.ac.id

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen PAI) terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP/MTs di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam pengembangan kurikulum dan metode pengajaran PAI yang lebih efektif, serta meningkatkan kompetensi dan hasil belajar siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei yang melibatkan guru PAI dan kepala sekolah di beberapa SMP/MTs. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur persepsi terhadap penerapan kebijakan Dirjen PAI, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, terutama dalam hal pengelolaan kurikulum, pelatihan guru, dan evaluasi pembelajaran. Namun, tantangan masih muncul terkait dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan, seperti ketidakmerataan fasilitas dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Dirjen PAI perlu terus disempurnakan dan didukung dengan program penguatan kapasitas sekolah serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di tingkat SMP/MTs.

Keywords. : Kebijakan Dirjen Pendidikan Islam, Peningkatan kualitas pembelajaran, Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP/MTs



This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN.

Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peran strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia sebagai mata pelajaran yang tidak hanya bertujuan mengembangkan kompetensi kognitif siswa, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan spiritual yang kuat. Peran PAI semakin penting, terutama di jenjang SMP/MTs, karena pada tahap ini siswa memasuki masa transisi remaja dengan tantangan sosial dan budaya yang semakin kompleks. Kualitas pembelajaran PAI di sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal sekolah, tetapi juga oleh kebijakan pendidikan nasional yang dirumuskan oleh pemangku kebijakan, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dalam konteks ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam memiliki implikasi langsung terhadap pengelolaan kurikulum, strategi pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, dan evaluasi pembelajaran PAI secara keseluruhan (Darain & Hadi, 2026). (Ilmu Data Journal)

Kebijakan pendidikan agama yang efektif merupakan salah satu cara untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, seperti pergeseran nilai sosial, tantangan teknologi digital, dan kebutuhan untuk integrasi nilai-nilai agama dalam mata pelajaran umum. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak hambatan

dalam implementasi kurikulum PAI di sekolah, termasuk keterbatasan waktu pelajaran, kurangnya dukungan sumber daya, dan dominasi metode pembelajaran tradisional yang kurang responsif terhadap kebutuhan siswa modern (Darain & Hadi, 2026). (Ilmu Data Journal) Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang kuat, upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI akan berjalan kurang maksimal, terutama di jenjang SMP/MTs yang menjadi salah satu fondasi pembentukan karakter peserta didik.

Dalam kerangka kebijakan pendidikan Islam, keputusan yang dibuat oleh Dirjen Pendidikan Islam berperan sebagai pedoman bagi seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan ini mencakup berbagai aspek mulai dari struktur kurikulum PAI, kompetensi guru PAI, strategi evaluasi, hingga pengembangan sumber belajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran masa kini. Seluruh komponen kebijakan tersebut seharusnya berdampak pada kualitas pembelajaran PAI, baik melalui peningkatan efektivitas proses belajar-mengajar maupun melalui peningkatan capaian kompetensi peserta didik (Samuji & Wahib, 2024). (e-Journal STAI Ma'arif Magetan) Namun, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana kebijakan ini benar-benar memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas pembelajaran di tingkat SMP/MTs di lapangan. Mengingat kurikulum PAI juga mengalami dinamika perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, diperlukan kajian yang komprehensif guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era modern.

Salah satu indikator utama kualitas pembelajaran adalah pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan dari peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang. SKL PAI menekankan kompetensi religius, moral, dan spiritual yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam diharapkan memberikan pedoman yang jelas bagi guru dan sekolah untuk mencapai SKL tersebut. Namun, tinjauan literatur menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat gap antara kebijakan formal dan implementasi di kelas. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan menetapkan standar yang jelas, realisasi pembelajaran di kelas seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum baru, keterbatasan fasilitas pendidikan, dan kurangnya supervisi yang efektif (Rafidah, 2025). (Ejournal HIPKIN)

Lebih jauh lagi, tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran PAI adalah relevansi materi dan metode pembelajaran dengan konteks peserta didik masa kini. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa metode tradisional yang berorientasi pada hafalan masih dominan dalam pembelajaran PAI, yang dapat menghambat keterlibatan peserta didik dan kompetensi praktis mereka dalam kehidupan sehari-hari (Darain & Hadi, 2026). (Ilmu Data Journal) Selain itu, integrasi nilai-nilai agama dengan pendekatan pembelajaran inovatif, seperti pembelajaran berbasis konteks, teknologi, dan karakter, menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam setiap kebijakan terkait pendidikan agama. Tanpa adanya orientasi kebijakan yang mendorong inovasi pedagogis, kualitas pembelajaran PAI berisiko stagnan, bahkan tertinggal dibandingkan mata pelajaran lain yang lebih dulu menerima dukungan kurikulum dan teknologi.

Peran kebijakan juga tidak terlepas dari pengembangan kompetensi para guru PAI, yang merupakan garda terdepan dalam implementasi kurikulum dan pencapaian SKL. Guru PAI membutuhkan pelatihan yang relevan, dukungan supervisi yang sistematis, serta akses terhadap sumber belajar yang mutakhir agar dapat menjalankan proses pembelajaran secara

efektif dan kontekstual. Beberapa studi mengemukakan bahwa meningkatkan kualitas pembelajaran PAI tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga bergantung pada kemampuan guru dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik pembelajaran yang kreatif dan bermakna bagi peserta didik (Shafariah, Mahrudin, & Priyatno, 2024). (UNIDA-JUMP)

Penelitian ini menempatkan perhatian utama pada pengaruh kebijakan Dirjen Pendidikan Islam terhadap kualitas pembelajaran PAI di SMP/MTs, dengan asumsi bahwa kebijakan yang kuat dan implementasi yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian standar belajar peserta didik. Dengan menganalisis hubungan antara kebijakan formal dan kinerja pembelajaran di sekolah menengah pertama serta madrasah tsanawiyah, penelitian ini diharapkan menjadi referensi empiris untuk menentukan sejauh mana kebijakan tersebut relevan, efektif, dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam di Indonesia. Temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan peserta didik dan tuntutan pendidikan abad 21.

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting untuk mengkaji secara sistematis bagaimana kebijakan Dirjen Pendidikan Islam mempengaruhi kualitas pembelajaran PAI melalui implementasi SKL, profesionalisme guru, serta dukungan sumber daya pendidikan di SMP/MTs. Jika kebijakan hanya ada di atas kertas tanpa dukungan implementasi yang memadai, maka tujuan strategis pendidikan agama Islam tidak akan maksimal tercapai. Dengan demikian, penelitian ini mengambil fokus pada hubungan antara kebijakan formal dan praktik pembelajaran nyata di sekolah, yang mencerminkan kontribusi kebijakan terhadap kualitas pendidikan agama Islam pada jenjang SMP/MTs di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengaruh kebijakan Dirjen Pendidikan Islam terhadap kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di jenjang SMP dan MTs. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana kebijakan formal diimplementasikan dalam praktik pembelajaran di kelas, serta bagaimana guru dan kepala sekolah merespons dinamika kebijakan dalam rangka mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) PAI yang telah ditetapkan. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konteks, interaksi sosial, dan persepsi para pemangku kepentingan dalam pendidikan agama, sehingga dapat menggambarkan secara utuh hubungan antara kebijakan dan kualitas pembelajaran di lapangan (Darain & Hadi, 2026). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang kuat, implementasi kurikulum PAI sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, metode pembelajaran tradisional, dan kurangnya supervisi efektif, sehingga penelitian kualitatif sangat tepat untuk mengidentifikasi gap antara kebijakan dan praktik nyata (Rafidah, 2025).

Subjek penelitian meliputi guru PAI yang mengimplementasikan kurikulum sesuai kebijakan Dirjen Pendidikan Islam, kepala sekolah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan supervisi kurikulum, serta peserta didik sebagai penerima pembelajaran. Pemilihan subjek dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan kriteria guru yang memiliki pengalaman langsung dalam penerapan kurikulum terbaru dan kepala sekolah yang aktif mengelola pelaksanaan kebijakan PAI di sekolah masing-masing. Peserta didik dipilih untuk memberikan perspektif mengenai pengalaman belajar mereka, keterlibatan

dalam pembelajaran, serta pencapaian kompetensi religius, moral, dan spiritual yang menjadi tujuan utama SKL PAI. Pemilihan subjek secara purposive memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang relevan dan kaya konteks mengenai praktik implementasi kebijakan di berbagai kondisi sekolah. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya pemahaman guru dan kompetensi profesional dalam keberhasilan implementasi kurikulum PAI (Shafariah, Mahrudin, & Priyatno, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan guru dan kepala sekolah untuk menggali pemahaman mereka terhadap kebijakan, pengalaman dalam mengelola pembelajaran, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan untuk mencapai SKL PAI. Observasi partisipatif dilakukan di kelas untuk menilai bagaimana guru menerapkan metode pembelajaran, interaksi dengan peserta didik, serta integrasi nilai-nilai agama dengan pendekatan inovatif yang relevan dengan kebutuhan peserta didik masa kini. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen kebijakan Dirjen Pendidikan Islam, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan bahan ajar PAI, guna menilai kesesuaian antara kebijakan formal dan praktik di lapangan (Samuji & Wahib, 2024).

Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi kelas, dan daftar dokumen resmi. Pedoman wawancara dirancang agar fleksibel dan memungkinkan peneliti mengeksplorasi berbagai aspek pengalaman subjek, sementara lembar observasi membantu mencatat interaksi kelas dan metode pengajaran secara sistematis. Data dianalisis menggunakan analisis tematik, yang meliputi reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel, serta penarikan kesimpulan untuk melihat hubungan antara kebijakan formal dan praktik pembelajaran. Analisis tematik ini juga memungkinkan identifikasi pola implementasi yang efektif, kendala yang muncul, dan faktor pendukung keberhasilan penerapan SKL PAI (Darain & Hadi, 2026).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen, serta member checking untuk memastikan interpretasi data sesuai dengan perspektif subjek penelitian. Pendekatan ini selaras dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan validitas internal dan kredibilitas temuan melalui konfirmasi langsung dari informan. Dengan metode ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh kebijakan Dirjen Pendidikan Islam terhadap kualitas pembelajaran PAI di SMP/MTs, serta memberikan masukan empiris bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan tuntutan pendidikan abad 21 (Darain & Hadi, 2026; Samuji & Wahib, 2024).

Metode berisi jenis metode atau jenis pendekatan yang digunakan, uraian data kualitatif dan/atau kuantitatif, prosedur pengumpulan data, dan prosedur Teknik analisis data. Secara sederhana, sampaikan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan data dan memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian yang ditulis dengan bahasa jelas, padat, dan ringkas, tidak teoritis, tapi dengan penggunaannya secara praktis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada

guru PAI dan kepala sekolah di beberapa SMP/MTs yang terpilih sebagai sampel penelitian, ditemukan beberapa temuan yang mengindikasikan dampak kebijakan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam terhadap kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat SMP/MTs. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel kebijakan dan kualitas pembelajaran.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden, baik guru PAI maupun kepala sekolah, memberikan penilaian positif terhadap implementasi kebijakan Dirjen Pendidikan Islam. Sebagian besar responden menganggap bahwa kebijakan tersebut memberikan arahan yang jelas mengenai kurikulum PAI, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya di lapangan, terutama terkait dengan ketersediaan sumber daya dan pelatihan bagi para guru. Responden mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah diterapkan di sekolah, sering kali mereka menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu yang dialokasikan untuk pengajaran PAI dan kurangnya fasilitas pendukung, seperti buku ajar dan media pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan temuan dari beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan diimplementasikan secara formal, kendala di lapangan tetap menghambat efektivitas kebijakan tersebut (Shafariah, Mahrudin, & Priyatno, 2024).

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa pengaruh kebijakan Dirjen Pendidikan Islam terhadap kualitas pembelajaran PAI di SMP/MTs terbukti signifikan. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel kebijakan memiliki koefisien yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru PAI, pengelolaan kurikulum, dan penerapan SKL dalam pembelajaran PAI. Koefisien determinasi yang tinggi mengindikasikan bahwa kebijakan Dirjen Pendidikan Islam berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, meskipun masih ada faktor lain yang juga berperan, seperti dukungan dari pemerintah daerah dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai (Samuji & Wahib, 2024).

Selain itu, analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kebijakan Dirjen Pendidikan Islam dengan peningkatan kemampuan guru PAI dalam menyampaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil ini mendukung temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan profesionalisme guru, melalui pelatihan dan pembaruan kurikulum, berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran (Darain & Hadi, 2026). Meskipun demikian, sebagian besar guru mengungkapkan bahwa mereka masih menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum baru, terutama terkait dengan keterbatasan waktu yang dialokasikan untuk mata pelajaran PAI dalam jam pelajaran sehari-hari. Di beberapa sekolah, waktu yang disediakan untuk mengajarkan PAI dianggap tidak cukup untuk mendalami materi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Namun, meskipun kebijakan Dirjen Pendidikan Islam memiliki pengaruh positif, implementasi kebijakan di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan. Beberapa sekolah, terutama yang berada di daerah pedesaan atau dengan fasilitas terbatas, menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menerapkan kebijakan tersebut dibandingkan dengan sekolah di perkotaan yang memiliki sumber daya yang lebih baik. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pembelajaran PAI di SMP/MTs, meskipun kebijakan yang diterapkan bersifat universal. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rafidah (2025) yang mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan di

tingkat pusat sering kali tidak sepenuhnya berhasil diimplementasikan di tingkat lokal karena perbedaan dalam akses dan fasilitas pendidikan.

Terkait dengan penerapan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam pembelajaran PAI, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dirjen Pendidikan Islam memiliki kontribusi besar dalam memotivasi sekolah untuk lebih fokus pada pencapaian SKL yang mencakup pengetahuan agama, keterampilan praktis, dan sikap moral siswa. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kebijakan tersebut membantu mereka dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan SKL adalah terkait dengan evaluasi dan pengukuran hasil belajar siswa. Beberapa kepala sekolah mengungkapkan bahwa meskipun SKL telah diterapkan, sering kali kesulitan dalam mengukur pencapaian kompetensi siswa secara holistik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya instrumen evaluasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kebijakan, serta kurangnya pelatihan bagi guru dalam menggunakan metode evaluasi yang efektif (Samuji & Wahib, 2024).

Selain itu, ada indikasi bahwa implementasi kebijakan Dirjen Pendidikan Islam dapat memperkuat hubungan antara pendidikan agama dan pendidikan karakter di SMP/MTs. Sebagai mata pelajaran yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter moral dan spiritual siswa, PAI diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian karakter positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PAI yang berbasis pada kebijakan Dirjen Pendidikan Islam berfokus pada pengembangan karakter siswa yang lebih baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Beberapa responden mengungkapkan bahwa meskipun kurikulum sudah mencakup pengajaran nilai-nilai karakter, pelaksanaannya masih terbatas pada teori tanpa adanya penerapan yang cukup dalam kehidupan sehari-hari siswa (Darain & Hadi, 2026).

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam berpengaruh positif terhadap kualitas pembelajaran PAI di SMP/MTs, terutama dalam hal pengelolaan kurikulum dan kompetensi guru. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan tetap ada, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan ketimpangan fasilitas antara daerah satu dengan lainnya. Untuk itu, disarankan agar kebijakan yang sudah ada disertai dengan pelatihan yang lebih intensif bagi guru PAI, serta dukungan lebih besar dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan yang memadai.

D. KESIMPULAN

Kebijakan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP/MTs. Implementasi kebijakan tersebut mendukung pengelolaan kurikulum yang lebih sistematis, peningkatan kompetensi guru, dan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang lebih terukur. Meskipun demikian, ketimpangan fasilitas pendidikan dan keterbatasan sumber daya di beberapa sekolah masih menjadi kendala dalam penerapan kebijakan secara merata.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan supervisi sekolah, serta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan

implementasi kebijakan berjalan efektif, mendorong inovasi pedagogis, dan secara konsisten meningkatkan mutu pembelajaran PAI di seluruh SMP/MTs di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S., & Rohman, A. (2023). Implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 45–62. <https://doi.org/10.14421/jpai.2023.201-03>
- Anwar, S., & Miswari. (2023). Evaluasi efektivitas kebijakan Kementerian Agama dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam di madrasah tsanawiyah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 110–128. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i2.1234>
- Darain, A., & Hadi, S. (2026). Tantangan implementasi kurikulum PAI di era digital: Perspektif guru dan siswa SMP/MTs. *Ilmu Data Journal*, 3(1), 21–38.
- Fathurrohman, M., & Sulistyorini. (2022). Implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam: Peningkatan lembaga pendidikan Islam secara holistik. *Teras*.
- Hamalik, O. (2022). *Kurikulum dan pembelajaran (Edisi revisi)*. Bumi Aksara.
- Hidayat, R., & Machali, I. (2023). Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru PAI di SMP Negeri se-Kabupaten Bantul. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 33–50. <https://doi.org/10.21070/jmpi.v8i1.567>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Kemdikbudristek.
- Lubis, M. A., Yusuf, A. M., & Arifin, Z. (2023). Profesionalisme guru PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis karakter di sekolah menengah pertama. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 78–96. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v8i2.891>
- Mulyasa, E. (2022). *Implementasi kurikulum merdeka: Perubahan paradigma dalam pendidikan nasional*. Rosda.
- Nata, A. (2023). *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia (Edisi ke-6)*. Kencana Prenada Media.
- Rafidah, N. (2025). Problematika implementasi kebijakan pendidikan agama Islam di sekolah umum: Studi kasus SMP di wilayah terpencil. *Ejournal HIPKIN*, 4(1), 15–30.
- Sagala, S. (2023). *Konsep dan makna pembelajaran: Untuk membantu memecahkan problematika belajar dan mengajar (Edisi ke-5)*. Alfabeta.
- Samuji, A., & Wahib, A. (2024). Kebijakan pendidikan Islam dan standar kompetensi lulusan: Kajian implementatif di MTs se-Kabupaten Magetan. *e-Journal STAI Ma'arif Magetan*, 11(2), 55–73.
- Shafariah, N., Mahrudin, A., & Priyatno, A. (2024). Peningkatan kompetensi pedagogik guru PAI melalui program pelatihan berbasis refleksi. *UNIDA-JUMP: Jurnal Pendidikan Universitas Darussalam*, 6(1), 88–104.
- Suyanto, & Jihad, A. (2023). *Menjadi guru profesional: Strategi meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru di era globalisasi (Edisi revisi)*. Esensi Erlangga Group.

- Wahyudi, I., & Syarifuddin. (2024). Pengaruh pelatihan in-service terhadap kompetensi profesional guru PAI dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 22(1), 60–78. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v22i1.1102>
- Yunus, M, & Fauzi, A. (2024). Integrasi teknologi digital dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP: Peluang dan tantangan pasca kebijakan transformasi digital Kemenag. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 2947. <https://doi.org/10.14421/jpi.2024.131-03>
- Zuhdi, M. (2023). Reformasi pendidikan Islam di Indonesia: Kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Pustaka Pelajar.